



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

2024

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

-- KATA PENGANTAR --

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan dengan baik.

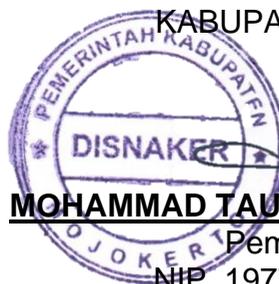
Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan amanat dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*).

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi landasan fundamental bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya bisa meningkatkan kualitas kerjanya pada tahun mendatang.

Mojokerto, Februari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770221 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah maupun masyarakatnya secara bersama-sama mengelola sumberdaya yang ada. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di dalam wilayah tersebut. Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, jadi bukan hanya sebagai usaha pemerintah semata. Pembangunan memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan untuk warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan. Pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan atau menambah lapangan kerja. Pembangunan juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional. Namun pencapaian keberhasilan pembangunan daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan perbedaan dalam menerapkan corak pembangunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan di daerah disesuaikan dengan potensi setempat, aspirasi masyarakat, juga permasalahan pembangunan di daerah.

Jalannya roda pembangunan di Kabupaten Mojokerto tidak dapat dilepaskan dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan serta pertambahan penduduk.

Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk memasuki siklus “bonus demografi”, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi nasional. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia

sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja sehingga lebih berkesempatan untuk meningkatkan tabungan keluarga. Dengan demikian, pada periode 2025 - 2035, Indonesia memiliki kesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi akan menjadi *windows of opportunity* bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Sebaliknya, bonus demografi bisa menjadi *windows of disaster* jika ternyata sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Untuk meraih keuntungan bonus demografi, ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi : (1) penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung, (2) tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif, (3) ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang (*windows of opportunity*) yang akan datang, dan (4) menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja.

Situasi tersebut hendaknya bisa dimanfaatkan sepanjang bonus demografi tidak hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, daya dukung pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kabupaten Mojokerto yang saat ini menjadi Kabupaten penyangga untuk daerah Surabaya. Ketersediaan peran penyedia jasa, fasilitasi perdagangan yang efisien dan kepastian hukum juga menjadi faktor yang menentukan. Melihat potensi menciptakan nilai tambah dari pengembangan dan pengalihan investasi, ditambah keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki, Kabupaten Mojokerto memiliki kesiapan dan keunggulan untuk ambil bagian. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kabupaten Mojokerto akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan *re-engineering* dan *re-structuring* di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perubahan terhadap posisi permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga *semi skill* dan *full skill*, baik untuk tingkatan profesional/ manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto tahun 2024, kondisi bulan Desember 2024, data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto dan Kemenakertrans RI melansir jumlah Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 908.607 orang, dengan angkatan kerjanya sebanyak 671.806 orang.

Tabel 1.1
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto
dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja (15 Th keatas)	906.653	893.299	908.607
2	Angkatan Kerja :	646.778	647.752	671.806
	- Bekerja	615.557	617.553	645.825
	- Penganggur	31.221	30.219	25.981
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,83	4,67	3,87
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,34	71,34	73,94

Sumber : diolah dari data BPS Kab. Mojokerto & Kemenakertrans RI

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto sebagai indikator capaian ketenagakerjaan adalah sebesar 3,87% telah terjadi penurunan sebesar 0,8% dari persentase 4,67% di Tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebanyak 645.553 Orang (28.272 orang) dan/ atau persentase selisih kenaikan sebesar 4,57% dari tahun 2023. Sedangkan jumlah penganggur pada tahun 2024 sebanyak 25.981 orang atau mengalami penurunan sebesar (-)17,1% dibandingkan tahun 2023 yang jumlahnya mencapai 30.219 orang. Salah satu faktor penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini dikarenakan visi misi Kepala Daerah dan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuka akses Pelatihan Kerja dan informasi pasar kerja seluas-luasnya. Namun keberhasilan penurunan angka TPT ini tidak serta merta memberhentikan langkah dan upaya-upaya berkelanjutan, karena hal bersifat kondisional terutama iklim investasi usaha dan kebijakan Upah Minimum Kabupaten Mojokerto, sebagaimana kita ketahui bersama semakin tingginya angka UMK Kab/Kota dapat mengakibatkan banyaknya perusahaan berhenti beroperasi atau pindah lokasi yang dampaknya ke pekerja itu sendiri yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, berkurangnya investor yang akan berminat untuk berusaha di wilayah Kabupaten Mojokerto dan penambahan angkatan kerja baru sebagai dampak dari bonus demografi struktur penduduk usia muda yang cukup besar berkontribusi menambah jumlah pencari kerja. Dengan demikian, pengangguran masih menjadi isu utama yang berpotensi menimbulkan persoalan dan kerawanan yang sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor penyebab Pengangguran terjadi antara lain disebabkan :

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi;
3. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja;
4. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai; dan
5. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama di kalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula bahwa pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas cenderung terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan ketrampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja dan persaingan pasar global yang membutuhkan tenaga kerja profesional berbasis *knowledge, skill, attitude* (KSA) ditambah keterampilan sosial (*social skill*). Terlebih rencana penerapan perjanjian perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), penerapan Industri 4.0 dan tantangan perubahan tatanan sosial (*society*) 5.0 mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang memenuhi standar profesional dan tatanan sosial kemasyarakatan yang tersistem dan baik.

Sedangkan berbicara masalah Penduduk, memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan suatu keinginan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk dan dikarenakan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto yang semakin melampaui batas ideal, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya

untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi sangat bersifat strategis untuk terus dijalankan karena di samping menjaga keutuhan NKRI, juga terkait kebijakan kependudukan lainnya berupa kebijakan pengendalian jumlah, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam LKJIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Maksud dari LKJIP ini adalah agar visi, misi, dan tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dapat tercapai sesuai harapan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang akan datang.

1.4. DATA UMUM ORGANISASI

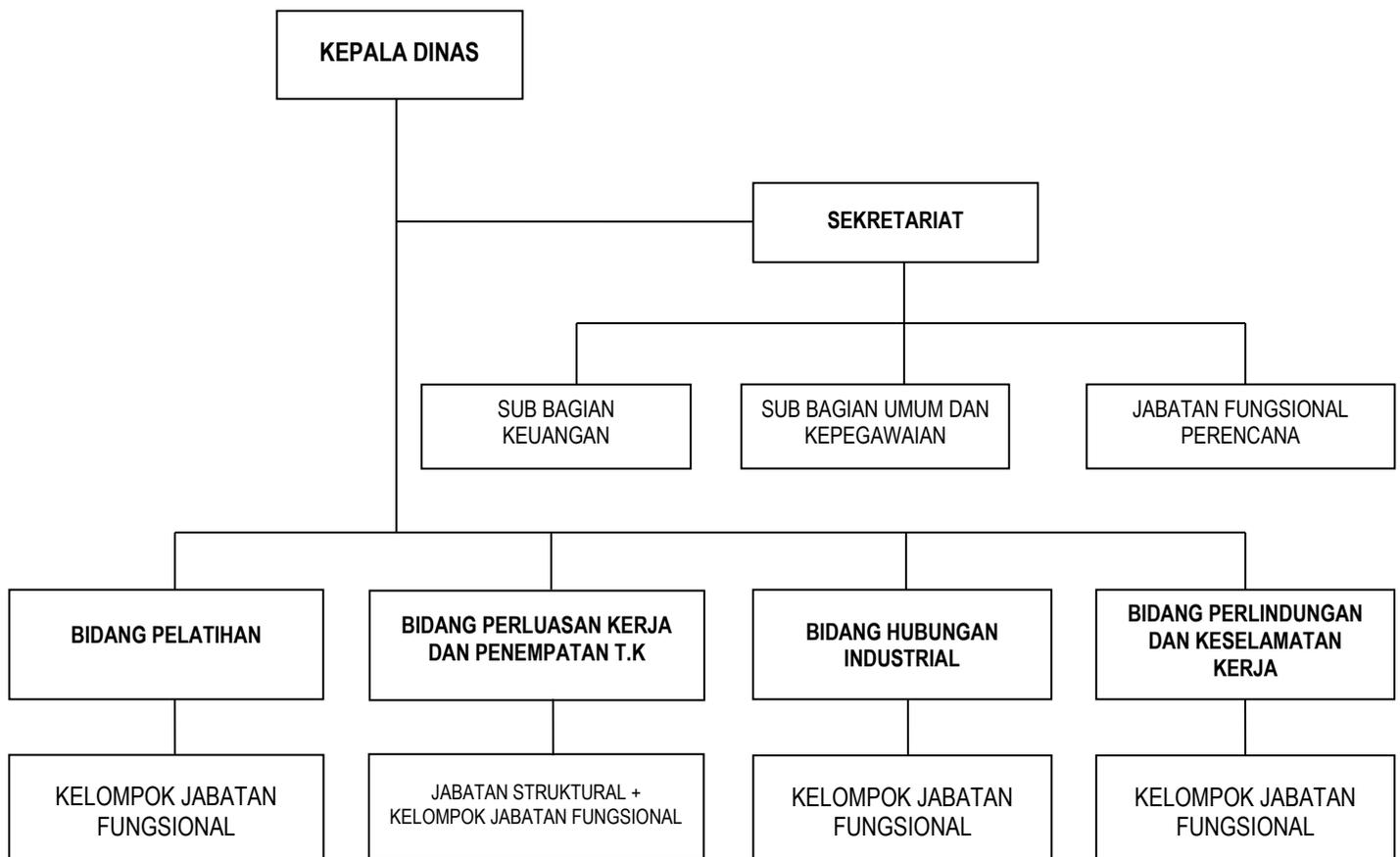
Dinas Tenaga kerja Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi “

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO**



Untuk menyelenggarakan organisasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto didukung struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Sedangkan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 adalah sebagai berikut

A. Bagian Kesatu

KEPALA DINAS, mempunyai tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja

B. Bagian Kedua

SEKRETARIAT

1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja untuk mengkoordinasikan

- bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi ;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. *Sub Bagian Keuangan*, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
 - b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - d. Menyusun laporan keuangan;

- e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang keuangan
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bagian Ketiga

BIDANG PELATIHAN

- 1) Bidang Pelatihan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi uji keterampilan dan sertifikasi, pelatihan ketenagakerjaan serta bina lembaga pelatihan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, lembaga sertifikasi profesi (LSP), tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga lain dalam pelaksanaan uji keterampilan kerja (UKK) dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - c. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - d. pelaksanaan uji keterampilan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - e. pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - f. pelaksanaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
 - g. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja meliputi pembinaan program latihan, pembinaan pengelola dan pembinaan prasarana dan sarana lembaga pelatihan kerja;
 - h. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja swasta;
 - i. pelaksanaan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja di perusahaan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
 - j. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan peningkatan produktifitas;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

D. Bagian Keempat

BIDANG PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 1) Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan informasi pasar kerja;
 - c. Pelaksanaan bursa kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan antar kerja dalam negeri dan luar negeri;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan lembaga penempatan tenaga kerja dan bursa kerja khusus (BKK);
 - f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengendalian dan pelayanan pengguna tenaga kerja asing;
 - g. Pelaksanaan dan fasilitasi program penciptaan dan perluasan kesempatan kerja;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi transmigrasi;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas;

Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- 1) *Seksi Transmigrasi*, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan fasilitasi pelaksanaan transmigrasi yang meliputi informasi, pendaftaran dan seleksi, verifikasi, perpindahan dan pembinaan pasca penempatan;
 - b. Menyusun bahan penyiapan, pendaftaran serta pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi;
 - c. Melakukan penyebaran informasi, sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan program perpindahan dan penempatan transmigrasi;
 - d. Melakukan pendataan animo calon transmigran;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama antar daerah dengan daerah tujuan transmigrasi;
 - f. Melakukan peninjauan calon lokasi transmigrasi;
 - g. Melakukan pendampingan dan pengawalan transmigran ke daerah tujuan;

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan sosial ekonomi transmigran pasca penempatan;
- i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh kepala bidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja.

E. Bagian Kelima

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi persyaratan kerja dan pengupahan, kelembagaan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dokumen syarat kerja dan pengupahan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perusahaan penyedia jasa pekerja serta pemborongan pekerjaan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit dan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
 - e. Pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
 - f. Pelaksanaan pelayanan perselisihan hubungan industrial;
 - g. Pelaksanaan deteksi dini, mogok kerja, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
 - h. pelaksanaan pembinaan syarat kerja dan norma kerja di perusahaan;
 - i. pelaksanaan pengembangan sistem hubungan industrial
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

F. Bagian Keenam

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA

- 1) Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja meliputi monitoring prasarana dan sarana, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan jaminan sosial.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan monitoring perlindungan norma ketenagakerjaan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi dan/ atau pengesahan terhadap obyek perlindungan ketenagakerjaan;;
 - d. pelaksanaan dan memfasilitasi penerapan pembinaan perlindungan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap penggunaan sarana dan prasarana obyek perlindungan ketenagakerjaan;
 - f. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi pelatihan serta pengembangan perlindungan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan serta penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/ buruh;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.5. PERAN STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, maka ditetapkan arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan agenda pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto. Prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program prioritas pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian meliputi :

1. Urusan ketenagakerjaan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
 - a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal;
 - b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 - c) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.

2. Urusan ketrasmigrasian, dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang ketenagakerjaan :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bertujuan untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM. Implementasi kegiatannya berupa :

- a. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- b. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi;

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa :

- a. Penciptaan lapangan kerja/perluasan kerja;
- b. Pembentukan wirausaha baru di sektor usaha mandiri sektor informal (WUB-UMSI);
- c. Pengembangan terapan teknologi padat karya (TPK) untuk kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur;
- d. Penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri;
- e. Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja khusus, dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS);

3. Program Hubungan Industrial

Bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Serta untuk peningkatan profesionalisme Pegawai bidang Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa :

- a. Pemeliharaan dan pengembangan hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi;
- b. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan;
- c. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan;
- d. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
- e. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama;
- f. Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- g. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal.
- h. Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui fasilitasi berupa pembinaan, sosialisasi dan monitoring bekerja sama dengan, Pegawai Pengawas Provinsi Jawa Timur yang berada di tingkat Korwil dan Stakeholder lainnya;
- i. Perlindungan jaminan ketenagakerjaan di perusahaan yaitu fasilitasi pelayanan berupa pembinaan, sosialisasi dan monitoring bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Pegawai pengawas provinsi Jawa Timur yang berada di tingkat Korwil dan Stakeholder lainnya;
- j. Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan fasilitasi berupa pembinaan, sosialisasi dan monitoring bekerja sama dengan, Pegawai Pengawas Provinsi Jawa Timur yang berada di tingkat Korwil dan Stakeholder lainnya;
- k. Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerja perempuan;
- l. Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak fasilitasi berupa pembinaan, sosialisasi dan monitoring bekerja sama dengan, Pegawai Pengawas Provinsi Jawa Timur yang berada di tingkat Korwil, pemerhati perempuan dan anak, pengurusutamaan gender dan Stakeholder lainnya.

B. Urusan Ketrasmigrasian :

Seksi Transmigrasi pada Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk :

1. Mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan.
2. Menjembatani kepentingan daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima) yang tertuang dalam perjanjian formal (*MoU*). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (*sharing of experiences*), manfaat (*sharing of benefits*), dan saling memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (*sharing of burdens*), terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menuntut skala ekonomi tertentu agar efisien untuk masing-masing daerah.

Implementasi kegiatannya berupa :

- a. Kerjasama antar daerah Provinsi, Kab./Kota luar Jawa;
- b. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- c. Pembekalan keterampilan calon transmigran;
- d. Monitoring dan evaluasi Transmigran di lokasi Trans.

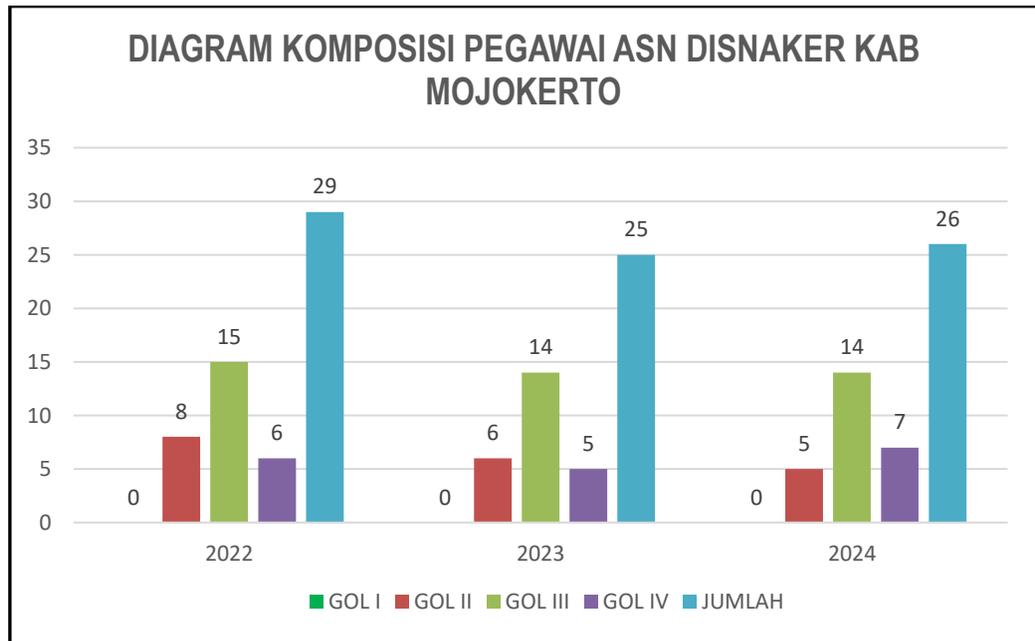
1.6. KEKUATAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan (*empowering*) pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang dirinci berdasarkan Pangkat/Golongan, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Perkembangan Jumlah PNS Menurut Pangkat / Golongan



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto – Bag. Umum dan kepegawaian

TAHUN	GOL PNS				JUMLAH
	I	II	III	IV	
2022	0	8	15	6	29
2023	0	6	14	5	25
2024	0	5	14	7	26

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto – Bag. Umum dan kepegawaian

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Demi terciptanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang antara lain sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BARANG	NILAI (RIBUAN RP)
Tanah		
Tanah		
Bangunan		
Gedung kantor	1 unit	999.056.310
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat Angkutan		
- Kendaraan roda 4	4 unit	710.420.000
- Kendaraan roda 2	2 unit	18.510.000
JUMLAH		

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto – Bag. Umum dan kepegawaian

3. Hubungan Kerjasama

Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan berbagai program pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dilakukan pembinaan hubungan kerjasama, baik dengan Instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota maupun dengan institusi pendidikan serta pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyediaan peluang kerja untuk pengurangan pengangguran.

- Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, Kabupaten/Kota.
Bentuk kerjasama dengan instansi terkait Kabupaten dituangkan dalam bentuk melalui sinkronisasi program untuk ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan di masing-masing Instansi, dengan Pemerintah Provinsi Jatim dilaksanakan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan tugas dekonsentrasi. Sedangkan dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan tugas pembantuan.

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 53 tahun 2014. Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja minimal terdiri dari :

- **Ringkasan Eksekutif**

Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

- **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- **Perencanaan dan Perjanjian Kerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- **Lampiran**

Bagian ini meliputi data penunjang yang memuat perhitungan pencapaian kinerja, dokumentasi kegiatan dan data lain yang terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto bersama-sama jajarannya telah menetapkan visi, misi, dan strategi sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Mojokerto dimana antara lain:

1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Visi Bupati Mojokerto yang diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

- **Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- **Maju** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial mental-spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi;
- **Adil** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor;
- **Makmur** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi Bupati yang terdiri dari 4 (empat) Misi yang merupakan penjabaran dari visi dimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto masuk ke dalam misi ke-2 yaitu

“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

A. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

➤ TUJUAN

Visi dan Misi Bupati Mojokerto yang menjadi akhir dari pencapaian tersebut adalah untuk melalui tujuan 2.1 pada RPJMD 2021-2026 adalah:

Mewujudkan Kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah

➤ SASARAN STRATEGIS

Untuk mensukseskan Visi dan Misi ke- 2 Bupati Mojokerto, Maka untuk menyelaraskan dan menciptakan tujuan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja menjadikan Sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto menjadi Tujuan OPD dengan Indikator Tujuan utamanya yaitu ***“Tingkat Pengangguran Terbuka”***. Didalam mencapai kinerja yang optimal berdasarkan Indikator Tujuan tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto sesuai tabel berikut ini :

Tabel II.A.1

INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

NO	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	
	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Serta Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja
		2.	Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif Serta Optimalisasi Perlindungan Ketenagakerjaan

➤ INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam menjalankan sasaran strategis didalam mewujudkan visi dan misi Bupati Mojokerto terakomodir beberapa Indikator

Kinerja Utama yang menjadikan arah dan landasan dalam sasaran dan tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja, yaitu antara lain :

1. Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten;
2. Persentase penyerapan tenaga kerja;
3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
4. Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial.

B. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan harus dilakukan secara holistic dan terpadu, maka upayanya dimulai dari tahap sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja (*pre-during-post employment*). Hal tersebut dilakukan dalam kerangka menjamin kesempatan kerja yang sama (*equal opportunities*) sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di bidang ketransmigrasian dan kependudukan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, kebijakan umum yang ditempuh adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui perlindungan, penataan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis, cepat tumbuh dan berkembang dalam penciptaan peluang usaha.

Arah kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian telah diselaraskan dengan agenda pembangunan, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2021-2026. Adapun arah kebijakan Disnaker Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

1. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**, kebijakannya meliputi :
 - (1) Optimalisasi pelatihan guna mendukung terwujudnya tenaga kerja dengan kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.
 - (2) Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
 - (3) Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi lembaga-lembaga pelatihan kerja.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja, kebijakannya meliputi:

- (1) Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (2) Pengoptimalan akses kesempatan kerja melalui kegiatan pameran kesempatan kerja (job fair) dan penyuluhan informasi bursa kerja;
- (3) Pengembangan fungsi lembaga layanan bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja.
- (4) Pembudayaan kewirausahaan, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.

3. Program Hubungan Industrial, kebijakannya meliputi :

- (1) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yang kondusif dan harmonis.
- (2) Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yang kondusif dan harmonis, serta mendukung upaya perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja.
- (3) Peningkatan upaya-upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- (4) Peningkatan upaya pengawasan (monitoring) dan perlindungan tenaga kerja.
- (5) Optimalisasi pelaksanaan dan pembudayaan K3 di perusahaan.
- (6) Peningkatan Kualitas dan ketersediaan Sarana dan Prasarana di perusahaan

2.2. PROGRAM PRIORITAS

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian implementasi kegiatannya, yang meliputi 3 (Tiga) program prioritas, yakni :

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM. Implementasi kegiatannya berupa :

- a. Pendidikan kemasyarakatan produktif pada bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- b. Pelatihan dalam rangka pengembangan standard kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

- c. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja.
- d. Pelatihan dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja.

Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa :

- a. Pembinaan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja di luar negeri.
- b. Pembinaan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja di dalam negeri.
- c. Penciptaan lapangan kerja/perluasan kerja.

3) Program Hubungan Industrial.

- Untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa:
 - a. Pembinaan dan pengembangan syarat kerja yang harmonis.
 - b. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan.
 - c. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- Untuk Perlindungan Ketenagakerjaan dioptimalkan dari sisi peningkatan profesionalisme Pegawai ASN Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto untuk perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa :
 - a. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
 - b. Pembinaan dan penerapan keselamatan kerja pada sektor industri dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.
 - c. Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerja perempuan.
 - d. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal.

Tabel 2.2.1

TARGET TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE .				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	Jmlh Peserta yang dilatih / Jmlh Peserta pelatihan terdata X 100	85%	85%	85%	87%	90%	90%
		Persentase penyerapan tenaga kerja	Jmlh Pencari kerja terserap / Jmlh Pencari kerja terdata X 100	82%	82%	84%	84%	85%	86%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	Jmlh perusahaan yang terjadi perselisihan HI tahun N / Jmlh perusahaan yang terdata X 100	6%	6%	5%	5%	4%	4%
		Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	Jmlh Perusahaan yang ikut kepesertaan jaminan sosial pekerja tahun N / jmlh keseluruhan perusahaan yang terdata	50%	51%	51%	52%	52%	53%

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto – Bag. Perencanaan

2.3. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto didalam menjawab tantangan arah pembangunan ketenagakerjaan melalui visi dan misi kepala daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara kepala daerah dengan kepala perangkat daerah yang merupakan sarana, alat fungsi kontrol dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada perjanjian kinerja kondisi anggaran tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada transisi APBD menuju ke Perubahan APBD (P-APBD), terjadi refocusing anggaran sebagai dampak kebijakan kepala daerah, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang ditargetkan pada tahun N tersebut. Namun dengan perencanaan yang baik dan timeline penyerapan anggaran yang terstruktur, maka diharapkan pencapaian kinerja bisa tercapai, tepat sasaran dan tepat guna.

Berikut ini dilampirkan tabel Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kepala Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto secara awal sebelum perubahan (APBD) dan setelah perubahan (P-APBD) Tahun 2024.

TABEL
FORMULIR INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA APBD DAN PAPBD TAHUN 2024

NO	SEBELUM PERUBAHAN (APBD)			SETELAH PERUBAHAN (P-APBD)		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	87%	Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	87%
		Persentase penyerapan tenaga kerja	86%		Persentase penyerapan tenaga kerja	86%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	3,5%	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	3,5%
		Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	86%		Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	86%
	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai sakin perangkat daerah	83,5%	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai sakin perangkat daerah	83,5%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%
		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	82%		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86%
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (APBD)				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (PAPBD)		
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	5.405.019.800	APBD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	5.259.052.600	PAPBD
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	897.700.000	APBD	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	740.160.240	PAPBD
	Program penempatan tenaga kerja	340.000.000	APBD	Program penempatan tenaga kerja	340.000.000	APBD
	Program hubungan industrial	3.221.192.000	APBD	Program hubungan industrial	4.200.749.900	PAPBD

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto – Bag. Perencanaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), 4 (empat) Program Ketenagakerjaan terdiri dari 1 (satu) program pendukung dan 3 (tiga) program prioritas serta 12 (Dua Belas) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) kegiatan pendukung dan 6 (enam) kegiatan prioritas, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa secara umum Disnaker Kabupaten Mojokerto telah merencanakan kinerja pembangunan ketenagakerjaan secara optimal dan baik terkait pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan urusan ketransmigrasian. Pengukuran capaian kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya telah dilakukan sejak awal tahapan perencanaan program dan kegiatan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan .

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan skala penilaian pengukuran, dari hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) kategori sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Penilaian

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KET
1	91% s.d ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% s.d ≤ 90%	Tinggi	
3	66% s.d ≤ 75%	Sedang	
4	51% s.d ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

1. Formulasi 1 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Formulasi 2 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah hasil capaian Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Indikator-indikator strategis yang dicapai pada tahun 2024 :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah

Indikator tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

**TABEL
TARGET KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024**

INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	4,76%	3,87%

Sumber data : 1. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 – Bappeda Kab. Mojokerto
: 2. BRS BPS Kab. Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Bahwa berdasarkan dokumen Reviu Rancangan Pemerintahan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil pencapaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada indikator tujuan tingkat pengangguran terbuka dengan target tahun 2024 yaitu 4,76% terealisasi sebesar 3,87%. Berikut ini tabel Hasil pencapaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir :

Tabel III.1

REALISASI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR TUJUAN

NO	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42	4,83	5,09	4,67	4,76	3,87

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini berdasarkan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menjadi Tujuan dan indikator Tujuan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 antara target dan realisasi terjadi penurunan yang cukup signifikan dimana target yang dicanangkan pada tahun 2022 sebesar 5,42% dan realisasi yang tercapai sebesar 4,83%. Sementara pada tahun 2023 dengan target sebesar 5,09 realisasi yang dapat dicapai adalah sebesar 4,67%. Dan untuk tahun 2024 dengan target 4,76%, realisasi yang dicapai adalah 3,87%. Selisih penurunan perbandingan antara tahun 2022 dengan 2023 ada penurunan angka TPT dengan selisih sebesar 0,16% sementara dari tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi selisih penurunan sebesar 0.8%.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, karena baik penurunan maupun kenaikan ini bersifat fluktuatif, faktor-faktor penyebabnya adalah iklim investasi dan kondisi kebijakan hubungan industrial dapat mengalami situasi kurang kondusif yang disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga efektifitas berusaha perusahaan dan produktivitas tenaga kerja terganggu. Apabila hal tersebut tidak segera tertangani dengan baik, maka dampak yang terbesar adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang nantinya dapat menyumbang angka pengangguran yang bertambah dan tingkat kemiskinan juga meningkat.

Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang intens dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan para Stakeholder yaitu pemilik perusahaan/ investor untuk bersama-sama berkomitmen kuat menjalankan kebijakan dan merumuskan kebijakan yang solutif sehingga mampu mengkondusifkan kondisi hubungan industrial di wilayah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Faktor-faktor positif lainnya adalah Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan beberapa program dan kegiatan prioritasnya antara lain Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan Pelatihan Kerja dapat terlaksana secara maksimal dan menumbuhkan animo masyarakat umum dan pencari kerja sehingga diharapkan target-target pembangunan manusia dibidang ketenagakerjaan tercapai realisasinya.

3.1. CAPAIAN KINERJA DISNAKER KABUPATEN MOJOKERTO

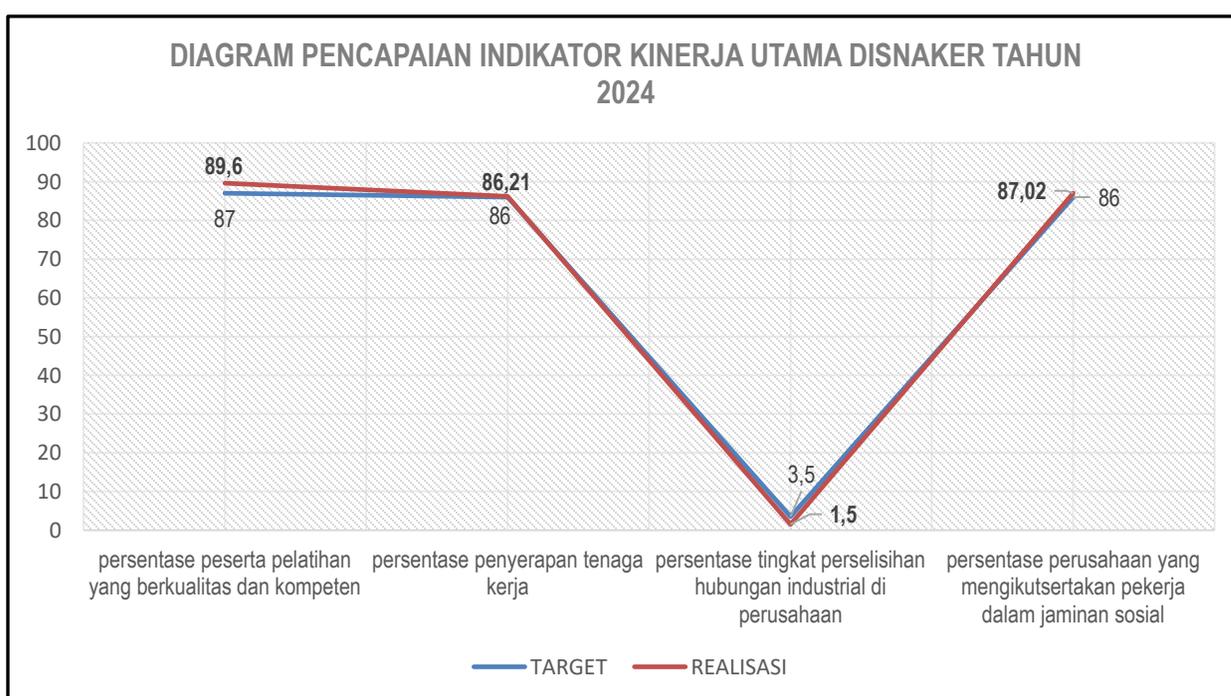
Seperti telah diuraikan di atas, dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai dengan rencana strategis 2021-2026 dan rencana kerja tahun 2024, telah dapat dicapai seluruhnya dengan Rincian lebih lanjut dalam bagian ini.

Tabel 3.1.a
Pencapaian Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
KINERJA UTAMA						
Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	87%	89,60	102,9	Sangat Tinggi	Bidang Pelatihan
	persentase penyerapan tenaga kerja	86%	86,21	100,2	Sangat Tinggi	Bidang perluasan kerja dan penempatan T.K
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	3,5%	1,50	157	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial
	persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	86%	87,02	101	Sangat Tinggi	1. Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja; 2. BPJS Ketenagakerjaan Kab. Mojokerto
KINERJA LAINNYA						
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai sakin perangkat daerah	83,50 (A)	81,30 (A)	97,4	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%	90,77	100,8	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86,00	86,00	100	Sangat Tinggi	Sekretariat
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100	Sangat Tinggi	Sekretariat + Bidang teknis pelaksana

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2024 – Bag. Perencanaan

DIAGRAM/ GRAFIK
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DISNAKER



Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto di tahun 2024 dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) di antara lain sebagai berikut :

1. Indikator persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten Penempatan Tenaga Kerja dengan target 87%, sementara realisasi sebesar 89,60%. Untuk Persentase capaian, hasil yang didapatkan sebesar 102,9%. Indikator ini masuk dalam kategori poin $91\% \leq 100\%$ (**Sangat Tinggi**) ;
2. Indikator persentase penyerapan tenaga kerja dengan target 86,00%, dan untuk realisasi sebesar 86,21%. Untuk Persentase capaian, hasil yang didapatkan sebesar 100,2%. Indikator ini masuk dalam kategori poin $91\% \leq 100\%$ (**Sangat Tinggi**);
3. Indikator persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan dengan target penurunan 3,5%, sementara penurunan angka perselisihan dapat ditekan dengan realisasi sebesar 1,50%. Untuk Persentase capaian, hasil yang didapatkan sebesar 157%. Indikator ini masuk dalam kategori poin $91\% \leq 100\%$ (**Sangat Tinggi**) ;
4. Indikator perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial dengan target 86,00%, sementara realisasi sebesar 87,02%. Untuk Persentase capaian, hasil yang didapatkan sebesar 101%. Indikator ini masuk dalam kategori poin $91\% \leq 100\%$ (**Sangat Tinggi**).

3.1.2. ANALISA KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN HAMBATAN

Dari hasil keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Utama pencapaian dari realisasi dan target, menunjukkan hasil dalam kategori yaitu **sangat tinggi** yaitu **155,3%**. Pencapaian hasil pada indikator-indikator yang tersedia pada dinas tenaga kerja kabupaten mojokerto pencapaian target tetap dilakukan monitoring dan evaluasi terkait keberhasilan, kegagalan dan hambatan antara lain :

1. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten

➤ Faktor Keberhasilan :

- a. Peningkatan mutu kualitas pelaksanaan pelatihan kerja yang mengurangi proporsi kuantitas peserta pelatihan kerja melalui penyaringan peserta yang memenuhi kualifikasi, peningkatan kualitas materi dan instruktur pelatihan, sarana prasarana pelaksanaan pelatihan juga diperketat lagi:
- b. Peningkatan dan penambahan waktu/ jam dan hari pelaksanaan pelatihan kerja, sehingga hal-hal tersebut mempengaruhi kondisi anggaran demi terciptanya kondisi peserta pelatihan kerja yang berkualitas dan kompeten

- c. Peningkatan koordinasi dengan BLK, LPK, BLK komunitas, dan didukung sosialisasi terhadap jenis-jenis pelatihan yang disediakan bagi masyarakat/ dan atau pencari kerja melalui kecamatan dan survey langsung melalui pemanfaatan media sosial

➤ Faktor Kegagalan :

Pada indikator ini tidak terdapat kegagalan yang berarti, namun tetap diwaspadai adanya menurunnya minat masyarakat/ dan atau pencari kerja terhadap jenis-jenis pelatihan yang disediakan sehingga berdampak pada kuota kepersertaan pelatihan kerja

➤ Faktor Hambatan :

Faktor hambatan pada indikator ini lebih ditemui dalam hal terjadinya kebijakan refocusing anggaran yang mempengaruhi teknis pelaksanaan pelatihan kerja sehingga komponen-komponen lama waktu pelatihan, ketersediaan instruktur pelatihan kerja, ketersediaan kebutuhan akomodasi bagi peserta juga harus dilakukan penyesuaian

2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

➤ Faktor Keberhasilan :

- a. Pelaksanaan Job Fair dilaksanakan mendekati jadwal kelulusan peserta didik di tingkat SMU/ SMA/ SMKN, ini dimaksudkan agar proses link and match antara perusahaan pemberi informasi lowongan kerja dengan pencari kerja dapat berdaya guna tinggi dalam menyerap tenaga kerja baru;
- b. Pengoptimalan sosialisasi, penyuluhan informasi bursa lowongan kerja, pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pembinaan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan fasilitasi transmigrasi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini.

➤ Faktor Kegagalan :

Pada indikator ini tidak terdapat kegagalan yang berarti, namun tetap diwaspadai adanya menurunnya minat masyarakat/ dan atau pencari kerja terhadap jenis-jenis informasi lowongan kerja yang disediakan sehingga berdampak pada penyerapan calon tenaga kerja baru.

➤ Faktor Hambatan :

- a. Penentuan koordinasi ketersediaan lokasi pelaksanaan job fair;
- b. Penentuan perusahaan peserta pemberi informasi lowongan kerja yang perlu dilakukan tahapan verifikasi yang memerlukan waktu;
- c. Kebijakan refocusing anggaran yang dapat mempengaruhi teknis pelaksanaan kegiatan

3. Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan

➤ Faktor Keberhasilan :

- a. penurunan angka perselisihan menjadi pencapaian yang diharapkan dikarenakan dengan target penurunan yang dicanangkan sebesar 3,5%. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mampu menekan hingga ke angka 1,50% dengan upaya-upaya prioritas untuk mencapai keberhasilan indikator tersebut melalui kegiatan-kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan peningkatan kinerja dewan pengupahan, dalam bentuk rapat tripartit (unsur pengusaha, pekerja/ serikat pekerja dan pemerintah) dalam penentuan, pembahasan dan perumusan kebijakan upah minimum pada Tahun N+1;
 2. Kegiatan sosialisasi upah minimum kabupaten Mojokerto, adalah kegiatan sosialisasi klasikal bagi pengusaha dan pekerja/ serikat pekerja dalam pelaksanaan upah minimum (UMK) di tingkat perusahaan;
 3. Kegiatan harmonisasi kelembagaan hubungan industrial adalah pembinaan dan tata cara bagi pengusaha dalam pendirian bipartit dan pendirian serikat pekerja dalam 1 (satu) perusahaan bagi pekerja;
 4. Kegiatan pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing adalah pembinaan bagi perusahaan penyedia tenaga kerja dan bagi pengusaha dalam penerapan, pelaksanaan dan tata cara penggunaan pekerja outsourcing;
 5. Kegiatan penanganan kasus perselisihan hubungan industrial, kegiatan ini menitikberatkan dalam tatacara penanganan kasus perselisihan hubungan industrial dan monitoring evaluasi (monev) dalam proses akhir penanganan perselisihan untuk Anjuran maupun Perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja;
 6. Kegiatan pemberdayaan LKS Bipartit, adalah kegiatan pertemuan antara unsur pengusaha, pekerja/ serikat pekerja dan pemerintah sebagai bentuk deteksi dini kerawanan perselisihan hubungan industrial di wilayah Kabupaten.

➤ Faktor Kegagalan dan hambatan :

- a. Faktor penghambat pada pelaksanaan indikator ini lebih dititikberatkan pada ketersediaan sumber daya manusia yaitu fungsional Tenaga Mediator Hubungan Industrial yang hanya sebanyak 3 (tiga) orang akan sangat terbatas sekali kemampuan penanganannya mengingat jumlah

perusahaan sebanyak 932 (perusahaan) dan rata-rata kasus perselisihan yang masuk pada tahun N berkisar di angka 25 sampai dengan 40 kasus per tahun;

- b. Faktor penghambat kedua adalah minimnya kerjasama dan kesadaran dalam hal administrasi dan prosedur persyaratan oleh para pihak yang berselisih, yaitu pihak perusahaan dan pekerja/ serikat pekerja yang sedang beracara mediasi hubungan industrial, sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian penanganan di dinas tenaga kerja Kabupaten

3. Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial

➤ Faktor Keberhasilan :

Indikator perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial juga mengalami kenaikan dengan persentase capaian yang melebihi 100% dimana hal ini disebabkan upaya kerjasama yang aktif dan koordinasi yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto untuk memberikan coverage perlindungan tenaga kerja yang lebih baik lagi bagi sektor usaha di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui upaya- upaya kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan;
2. Kegiatan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
3. Kegiatan Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak;
4. Kegiatan Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
5. Kegiatan Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan

➤ Faktor Kegagalan dan hambatan :

1. Faktor kegagalan dan penghambat pada pelaksanaan indikator ini lebih dititikberatkan pada ketersediaan sumber daya manusia yaitu fungsional Tenaga fungsional ahli K3 yang hanya sebanyak 2 (dua) orang akan sangat terbatas sekali kemampuan pelaksanaannya sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, dikarenakan jumlah perusahaan di wilayah kabupaten mojokerto sebanyak 932 Perusahaan;

2. Faktor penghambat kedua adalah minimnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial sebagai upaya perlindungan dari resiko bahaya kecelakaan kerja dan peningkatan fasilitas kesejahteraan.

Pada pencapaian kinerja lainnya di tahun 2024 terdapat 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dengan perincian sebagai berikut :

1. Indikator nilai saki perangkat daerah di tahun 2024 dicapai Nilai sebesar 81,30 dengan target 83,50, diperoleh persentase capaiannya sebesar 97,4%;
2. Indikator persentase realisasi anggaran perangkat daerah dengan target penyerapan anggaran 90%, realisasi yang dicapai sebesar 90,77%. Untuk indikator ini persentase capaiannya sebesar 100,8%;
3. Indikator kinerja Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja, dengan target nilai 86,00 pada tahun 2024, sementara untuk hasil yang dicapai nilainya adalah 86,00. Dengan hasil tersebut diperoleh persentase capaian sebesar 100
4. Indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 2 inovasi, yang tercapai adalah 2 Inovasi sehingga persentase realisasi yang dicapai adalah 100%

3.1.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Berikut ini adalah tabel pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja level program pada 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 3.1.3.a.1

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA LEVEL SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN			REALISASI KINERJA TAHUN		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	85%	85%	87%	85,06%	85,21%	89,60%
	persentase penyerapan tenaga kerja	82%	84%	86%	82,10%	84,83%	86,21%
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	6%	5%	3,5%	2,15%	2,25%	1,50%
	Persentase perusahaan yang mengikutsertakan	51%	51%	86%	55,47%	85,84%	87,02%

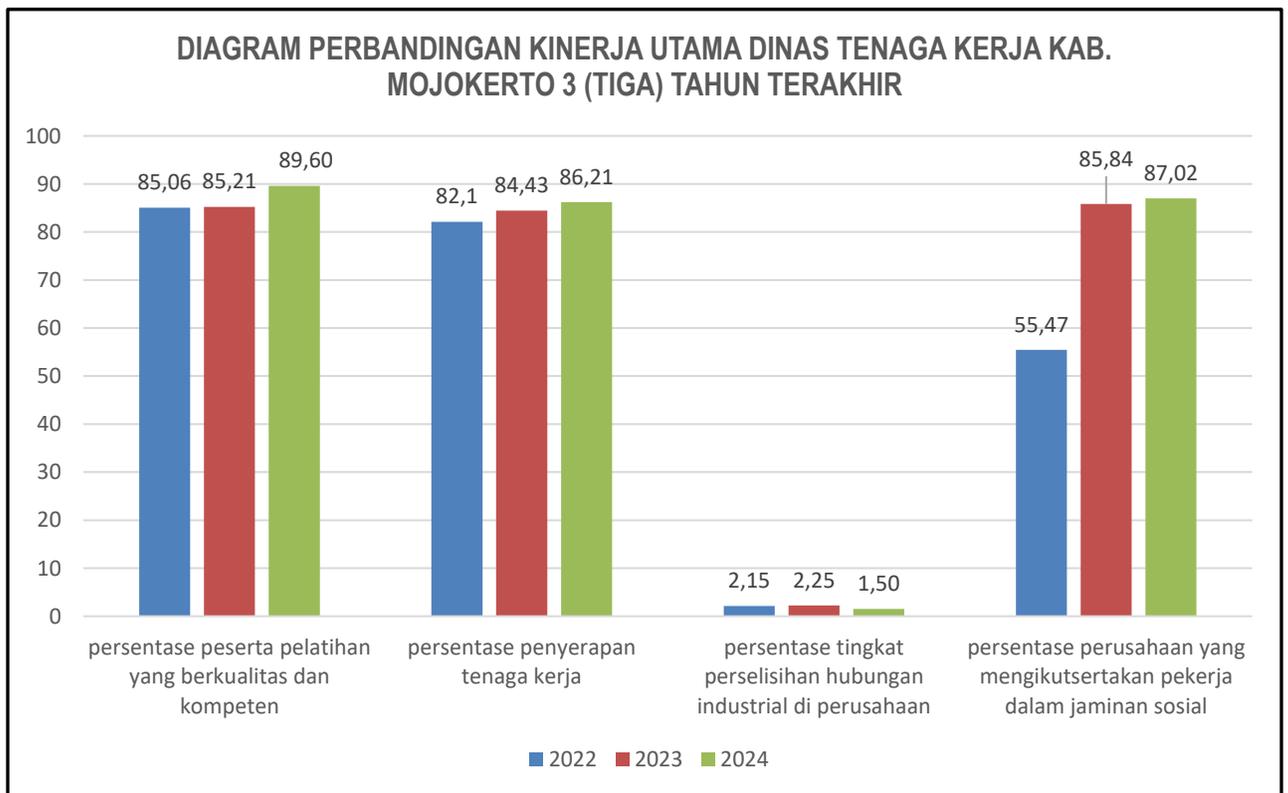
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN			REALISASI KINERJA TAHUN		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	pekerja dalam jaminan sosial						
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai sakin perangkat daerah	83.90 (A)	84.40 (A)	83.50 (A)	72,11 (B)	83,01 (A)	81,30 (A)
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%	90%	90%	86,63	89,09	90,77
	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75	75	86,00	79,62	86,00	Proses di BKSDM
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi

Tabel 3.1.3.a.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA LEVEL PROGRAM

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN			REALISASI KINERJA TAHUN		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Program penempatan tenaga kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang terpenuhi	70%	72%	72%	71.74%	72.41%	72.98%
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi	25%	25%	30%	25.24%	26.35%	52.83%
Program hubungan industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	80%	80%	80%	100%	80.95%	85.71%
	Persentase tenaga kerja yang terdaftar jaminan sosial	55%	56%	56%	55.02%	76.08%	76.31%
Program perencanaan tenaga kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berikut ini adalah perbandingan kinerja utama dinas selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam bentuk diagram kinerja :



Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2024 – Bag. Perencanaan

Dari perbandingan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2022, 2023 dan 2024 didapatkan perbedaan capaian realisasi antara lain pada indikator :

➤ **Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten**

Pada tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 85,06% dan terjadi kenaikan pada tahun 2023 menjadi 85,21%. Sementara pada akhir tahun 2024, kembali mengalami kenaikan sebesar 89,60%. Perbandingan antara tahun 2022 dengan 2023 mengalami selisih kenaikan sebesar 0,15% dan pada tahun 2023 dengan tahun 2024 terjadi selisih kenaikan sebesar 3.85%.

➤ **Persentase penyerapan tenaga kerja :**

Pada tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 82,10% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 84,43%. Sementara pada akhir tahun 2024 persentase terjadi kenaikan capaian sebesar 86,21%. Perbandingan antara tahun 2022 dengan 2023 mengalami selisih kenaikan sebesar 5,02%. Sementara untuk tahun 2023 menuju tahun 2024 selisih kenaikan sebesar 1.78%

➤ **Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan**

Persentase capaian indikator ini pada tahun 2022 yaitu 2,15%, sementara pada tahun 2023 tingkat perselisihan terjadi kenaikan 2,25% namun masih dibawah target penurunan sebesar 5% sesuai RPJMD dan Renstra 2021-2026 Disnaker Kab.

Mojokerto dan pada Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 1,50% atau selisih penurunannya dari tahun 2023 sebesar 0,75%.

➤ ***Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial***

Persentase realisasi capaian pada indikator ini mengalami perubahan pada RPJMD dan Renstra Disnaker Kab. Mojokerto tahun 2021-2026 yang sebelumnya *Persentase penurunan angka kecelakaan kerja* berubah menjadi *Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial*. Perubahan indikator dikarenakan adanya kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota. Realisasi pencapaian pada indikator ini menunjukkan pencapaian yang baik, dimana pada tahun 2022 target yang dicanangkan sebesar sebesar 51% perusahaan yang ikut serta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, tercapai sebesar 55,47% melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar 85,84%, dan pada tahun 2024 kembali terjadi kenaikan sebesar 87,02%. Hal ini disebabkan optimalisasi dari BPJS Ketenagakerjaan dan kerjasama yang intens dan baik dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto untuk lebih memperluas coverage layanan perlindungan tenaga kerja disemua lini sektor usaha swasta dan pemerintah.

➤ ***Nilai sakip perangkat daerah***

Pada indikator ini, capaian nilai sakip yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 72,11 (B), dan mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan nilai 83,01 (A), walaupun belum mencapai target yang dicanangkan yaitu 84,40 (A), Nilai tersebut mampu mendongkrak posisi penilaian sakip pada aplikasi/ website Si-sakip Kabupaten Mojokerto dari urutan nomor 55 menjadi nomor 21 pada evaluasi penilaian kinerjanya. Sedangkan di tahun 2024 Nilai Sakip Disnaker Kab. Mojokerto kembali mengalami penurunan di angka 81,30 (A)

➤ ***Persentase realisasi anggaran perangkat daerah***

Realisasi penyerapan anggaran di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang berpedoman pada target sebesar 90%. Pada tahun 2022 dicapai sebesar 86,63%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 89,09%. Dari hasil tersebut dapat dilihat penyerapan anggaran di tahun 2022 tersebut realisasinya cenderung meningkat. Kondisi tersebut mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024 di angka 90,77%.

➤ ***Indeks profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja***

Penilaian indeks profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 mendapatkan nilai 56,60 dengan kategori sangat rendah, sehingga di tahun 2023 dilakukan upaya-upaya internal OPD yang dapat menaikkan angka tersebut. Dan pada tahun 2023 didapatkan penilaian IP ASN Disnaker

mendapatkan nilai 79,62 dengan kategori sedang. Sementara di tahun 2024 Nilai IP ASN terjadi kenaikan kembali di angka 86,00

➤ **Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**

Indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 fokus pada pengembangan dan berkelanjutan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial (Si-Pengasih) dan Inovasi Standar Operasional Tim Pengelola Data Ketenagakerjaan (Tata Kerja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Sehingga hasil inovasi yang dihasilkan adalah 2 (Dua) inovasi.

Tabel 3.1.3.b.

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d. Akhir periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	90%	89,60%	0,4
	persentase penyerapan tenaga kerja	86%	86,21%	0,24
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	4%	1,50%	62,5
	persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	53%	87,02%	64,1
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai saki perangkat daerah	85,90 (A)	81,30 (A)	-5,35
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%	90,77	0,77
	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75	86,00	(+)11
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2024 – Bag. Perencanaan

Bahwa berdasar keterangan pencapaian kinerja sampai dengan akhir RPJMD/ Renstra 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja menunjukkan hasil kinerja yang telah sesuai dengan acuan program dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan visi dan misi ke-2 Bupati Mojokerto, namun perlu diperhatikan bahwa angka-angka yang tertera pada tabel tersebut sifatnya dapat berubah-ubah berdasarkan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.1.3.c.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi/ Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	*REALISASI PROVINSI/ NASIONAL	KET (+/-)
Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	89,60%	73%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	*REALISASI PROVINSI/ NASIONAL	KET (+/-)
kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	persentase penyerapan tenaga kerja	86,21%	35,97%	
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	1,50%	30%	
	persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	87,02%	-	Perbedaan indikator
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai sakin perangkat daerah	81,30 (A)	91,20 (AA)	
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90,77	-	Perbedaan indikator
	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86,00	75,36	
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	-	Perbedaan indikator

**Perbandingan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur*

Bahwa berdasarkan Rencana Strategis Nasional melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 yaitu *Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kualitas dan daya saing SDM tercermin dari penduduk yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter*

Maka untuk mensinkronisasikan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan realisasi Nasional, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berpedoman pada pelaksanaan 3 (Tiga) program prioritas yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dan;
3. Program Hubungan Industrial.

Berikut ini sasaran dan program Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ditampilkan secara format tabel:

Tabel 3.1.3.d

Sasaran dan Program Prioritas Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

NO	SASARAN	PROGRAM
----	---------	---------

	Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Program penempatan tenaga kerja
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	Program hubungan industrial

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2024 – Bag. Perencanaan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Adapun kinerja pengelolaan keuangan yang digunakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, didapatkan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.2.a
Alokasi Anggaran Persasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN DARI TOTAL
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	760.284.340	7,2%
		persentase penyerapan tenaga kerja	340.000.000	3,21
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	4.200.749.900	39,77
		persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial		
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel	Nilai sakin perangkat daerah	5.259.052.600	49,80
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah		
		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		
	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	0	0

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2024 – Bag. Keuangan

Dari tabel 3.2.a. perihal data alokasi anggaran persasaran didapatkan keterangan, untuk anggaran keseluruhan dengan 3 (tiga) program utama sebesar Rp. 5.301.034.240,-. sementara untuk anggaran terbesar dialokasikan pada indikator Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan dan Persentase Perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial total sebesar Rp. 4.200.749.900,- (Empat milyar dua ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Anggaran tersebut terbagi dari dua sumber anggaran komponen Refocusing Perubahan APBD dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Pemanfaatan anggaran tersebut dialokasikan pada program hubungan industrial

dengan rincian kegiatan sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Maksud dan tujuan dari pengalokasian anggaran tersebut difokuskan untuk pencegahan dan penanganan perselisihan hubungan industrial agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal dan memberikan coverage perlindungan BPJS Ketenagakerjaan lebih luas lagi terhadap sektor swasta dan pemerintah. Di tempat kedua anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang Pelatihan kerja dengan Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang mencapai anggaran sebesar Rp. 760.284.340 (Tujuh ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), anggaran terbagi 2 (dua) sumber dana APBD dan DBHCHT.

Sementara itu untuk pengalokasian dana anggaran terendah ada pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyerapan tenaga kerja sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), anggaran ini difokuskan untuk pelaksanaan Pelayanan antar kerja (AKAD, AKL), Pameran bursa kerja Job Fair, Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM) dan Pembinaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Berikut ini adalah capaian realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TW4 Bulan Desember Tahun 2024:

**TABEL LRA
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024**

TRIBUNAL IV TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PAPPB 2024 (Rp)	RENCANA s.d. November 2024	REALISASI s.d. November 2024	DESEMBER		TARGET REALISASI s.d. DESEMBER 2024	JUMLAH REALISASI ANGGARAN s.d. Desember 2024	% target	SISA ANGGARAN	% realisasi total	KENDALA
					RENCANA (Rp)	RENCANA REALISASI KEUANGAN (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7)	10 = (8/3)*100%	11 = (3-9)	12 = (9/3)*100%	13
	DINAS TENAGA KERJA	10.560.086.840	10.214.427.543	8.427.773.229	345.659.297	1.157.255.796	10.560.086.840	9.585.029.025	100,00	975.057.815	90,77	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.259.052.600	4.975.969.903	3.902.096.075	283.082.697	505.446.296	5.259.052.600	4.407.542.371	100,00	851.510.229	83,81	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	17.500.000	15.680.700	15.135.300	1.819.300	1.650.000	17.500.000	16.785.300	100,00	714.700	95,92	
	1 Sub Kegiatan Penyusun dokumen perencanaan Perangkat daerah	7.500.000	6.680.300	6.241.100	819.700	775.000	7.500.000	7.016.100	100,00	483.900	93,55	
	2 Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	10.000.000	9.000.400	8.894.200	999.600	875.000	10.000.000	9.769.200	100,00	230.800	97,69	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.847.392.600	4.595.264.477	3.536.004.542	252.128.123	477.290.582	4.847.392.600	4.013.295.124	100,00	834.097.476	82,79	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.847.392.600	4.595.264.477	3.536.004.542	252.128.123	477.290.582	4.847.392.600	4.013.295.124	100,00	834.097.476	72,95	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.160.000	123.525.000	111.062.500	4.635.000	6.475.000	128.160.000	117.537.500	100,00	10.622.500	91,71	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	49.772.100	46.502.000	227.900	-	50.000.000	46.502.000	100,00	3.498.000	93,00	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	8.600.000	7.380.000	7.042.500	1.220.000	1.350.000	8.600.000	8.392.500	100,00	207.500	97,59	
	3 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	19.812.900	15.369.600	187.100	1.275.000	20.000.000	16.644.600	100,00	3.355.400	83,22	
	4 Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	16.960.000	16.960.000	13.398.400	-	-	16.960.000	13.398.400	100,00	3.561.600	79,00	
	5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32.600.000	29.600.000	28.750.000	3.000.000	3.850.000	32.600.000	32.600.000	100,00	-	100,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.000.000	179.654.026	177.951.633	16.345.974	16.000.414	196.000.000	193.952.047	100,00	2.047.953	98,96	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	70.000.000	64.154.026	62.451.633	5.845.974	5.500.414	70.000.000	67.952.047	100,00	2.047.953	97,07	
	2 Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	126.000.000	115.500.000	115.500.000	10.500.000	10.500.000	126.000.000	126.000.000	100,00	-	100,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	61.845.700	61.942.100	8.154.300	4.030.300	70.000.000	65.972.400	100,00	4.027.600	94,25	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	55.000.000	48.678.100	46.948.300	6.321.900	4.030.300	55.000.000	50.978.600	100,00	4.021.400	92,69	
	2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15.000.000	13.167.600	14.993.800	1.832.400	-	15.000.000	14.993.800	100,00	6.200	99,96	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	760.284.340	760.284.340	708.618.800	-	8.350.000	760.284.340	716.968.800	100,00	43.315.540	94,30	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	740.160.240	740.160.240	697.197.800	-	5.100.000	740.160.240	702.297.800	100,00	37.862.440	94,88	
	1 Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	740.160.240	740.160.240	697.197.800	-	5.100.000	740.160.240	702.297.800	100,00	37.862.440	94,88	

No	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN P APBD 2024 (Rp)	RENCANA s.d. November 2024	REALISASI s.d. November 2024	DESEMBER		TARGET REALISASI s.d. DESEMBER 2024	JUMLAH REALISASI ANGGARAN s.d. Desember 2024	% target	SISA ANGGARAN	% realisasi total	KENDALA
					RENCANA (Rp)	RENCANA REALISASI KEUANGAN (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7)	10 = (8/3)*100%	11 = (3-9)	12 = (9/3)*100%	13
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.124.100	20.124.100	11.421.000	-	3.250.000	20.124.100	14.671.000	100,00	5.453.100	72,90	
	1 Sub Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	20.124.100	20.124.100	11.421.000	-	3.250.000	20.124.100	14.671.000	100,00	5.453.100	72,90	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	340.000.000	340.000.000	278.086.604	-	26.155.000	340.000.000	304.241.604	100,00	35.758.396	89,48	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja Ddi Daerah Kabupten/Kota	115.000.000	115.000.000	97.462.504	-	3.710.000	115.000.000	101.172.504	100,00	13.827.496	87,98	
	1 Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	90.000.000	90.000.000	77.792.904	-	1.700.000	90.000.000	79.492.904	100,00	10.507.096	88,33	
	2 Sub Kegiatan Perluasan kesempatan kerja	25.000.000	25.000.000	19.669.600	-	2.010.000	25.000.000	21.679.600	100,00	3.320.400	86,72	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	175.000.000	175.000.000	157.590.400	-	5.600.000	175.000.000	163.190.400	100,00	11.809.600	93,25	
	1 Sub Kegiatan Job fair/bursa kerja	175.000.000	175.000.000	157.590.400	-	5.600.000	175.000.000	163.190.400	100,00	11.809.600	93,25	
	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	50.000.000	50.000.000	23.033.700	-	16.845.000	50.000.000	39.878.700	100,00	10.121.300	79,76	
	1 Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran indonesia (PMI)	50.000.000	50.000.000	23.033.700	-	16.845.000	50.000.000	39.878.700	100,00	10.121.300	79,76	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.200.749.900	4.138.173.300	3.538.971.750	62.576.600	617.304.500	4.200.749.900	4.156.276.250	100,00	44.473.650	98,94	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	4.200.749.900	4.138.173.300	3.538.971.750	62.576.600	617.304.500	4.200.749.900	4.156.276.250	100,00	44.473.650	98,94	
	1 Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupetn/kota	180.000.000	155.520.000	111.781.200	24.480.000	63.830.000	180.000.000	175.611.200	100,00	4.388.800	97,56	
	2 Sub Kegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupetn/kota	25.000.000	24.375.000	15.342.000	625.000	8.255.200	25.000.000	23.597.200	100,00	1.402.800	94,39	
	3 Sub Kegiatan Pelaksanaan opsional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	45.000.000	45.000.000	7.649.700	-	37.210.500	45.000.000	44.860.200	100,00	139.800	99,69	
	4 Sub Kegiatan Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3.950.749.900	3.913.278.300	3.404.198.850	37.471.600	508.008.800	3.950.749.900	3.912.207.650	100,00	38.542.250	99,02	

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto – Bagian Keuangan Tahun 2024

Berikut ini adalah tabel realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tahun 2024:

Tabel 3.2.b
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	87%	89,60%	102,9%	760.284.340	716.968.800	94,30
	persentase penyerapan tenaga kerja	86%	86,21%	100,2%	340.000.000	304.241.604	89,50
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	3,5%	1,50%	157%	4.200.749.900	4.156.276.250	98,90
	persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	86%	87,02%	101%			
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel	Nilai sakin perangkat daerah	83,50 (A)	81,30(A)	97,4	5.259.052.600	4.407.542.371	83,80
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%	90,77	100,8			
	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86,00	86,00	100			
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100	0	0	0

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2024 – Bag. Keuangan

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan telah mencapai realisasi rata-rata sebesar 90,77%. dengan rincian sebanyak 3 (tiga) program prioritas untuk memenuhi target Indikator sasaran pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan 1 (satu) program pendukung.

Pada Tabel 3.2.2 perihal pencapaian kinerja dan anggaran. persentase realisasi anggaran terbesar terdapat pada indikator kinerja utama persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan dan indikator persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial. Pada Indikator tersebut

pendayagunaan anggaran digunakan untuk pembinaan, fasilitasi, pencegahan dan penanganan perselisihan hubungan industrial, pemberdayaan Lembaga Kerjasama bipartit dan tripartit, peningkatan kinerja dewan pengupahan serta sosialisasi UMK Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di posisi kedua ada pada indikator Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten, indikator rincian kegiatannya berupa fasilitasi pelatihan kerja yang diminati oleh masyarakat dan/ atau pencari kerja di wilayah Kabupaten Mojokerto

3.3. EFISIENSI ANGGARAN

Pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan program pembangunan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagai leading sektor nya mendapatkan pada tahun 2024 mendapatkan total anggaran sebesar Rp.10.560.086.840,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) dan Realisasi anggaran sebesar Rp.9.585.029.025,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), dari realisasi tersebut didapatkan persentase capaian realisasi sebesar 90.77% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.975.057.815,- atau sebesar 9,23%. Berikut ini capaian realisasi per Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto :

Tabel.3.3.a
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2024

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN			
		ALOKASI	REALISASI	% CAPAIAN	% EFISIENSI
Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	760.284.340	716.968.800	94,30	5.7
	persentase penyerapan tenaga kerja	340.000.000	304.241.604	89,50	10.5
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	4.200.749.900	4.156.276.250	98,90	1.1
	persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial				
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel	Nilai sakin perangkat daerah	5.259.052.600	4.407.542.371	83.80	16.2
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah				
	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja				
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	0	0	0	0

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Tahun 2024 – Bag. Perencanaan

Secara Keseluruhan rata-rata realisasi anggaran dapat dikategorikan pada angka 76% s.d \leq 90% (**Tinggi**). Walaupun masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun kondisi tersebut adalah berdasarkan situasi di lapangan dan secara keseluruhan unsur pada bidang teknis pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan tugas dan menutup tahun 2024 dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya dokumen LKJIP ini, setiap pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan sumber daya maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya.

Bahwa pencapaian kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Bupati), telah dijadikan pedoman dalam pencapaian kinerja dan didapatkan hasil kesimpulan antara lain :

- a. Pada indikator persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten didapatkan realisasi kinerja 89,60 dengan target yang ingin dicapai sebesar 87%, sedangkan capaian kinerja keseluruhan adalah sebesar 102,9%;
- b. Pada indikator persentase penyerapan tenaga kerja didapatkan realisasi kinerja 86,21. dengan target yang ingin dicapai sebesar 86%, sedangkan capaian kinerja keseluruhan adalah sebesar 100,2%;
- c. Pada indikator persentase tingkat perselisihan hubungan industrial didapatkan realisasi kinerja 1,50. dengan target persentase penurunan perselisihan HI yang ingin dicapai sebesar 3,5%. Maka capaian kinerja keseluruhan adalah sebesar 157%;
- d. Pada indikator persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial didapatkan realisasi kinerja 87,02. dengan target persentase yang ingin dicapai sebesar 86%. Maka capaian kinerja keseluruhan adalah sebesar 101%.

Pada indikator-indikator kinerja utama yang telah ditampilkan sebelumnya, telah didapat kondisi pencapaian kinerja tertinggi ada pada indikator persentase tingkat perselisihan hubungan industrial. Namun perlu diwaspadai lebih lanjut pada tahun-tahun mendatang, dimana kondisi hubungan industrial dapat berubah sebagai dampak implementasi kebijakan baik di level pusat, provinsi dan daerah Kab/Kota.

Pada umumnya, sebagian besar pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan ketrasmigrasian pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan dengan baik, dimana capaian kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, dalam pencapaiannya tentu masih terdapat kendala dan hambatan dalam beberapa indikator kinerja dikarenakan adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target dimaksud.

4.2 SARAN/ REKOMENDASI DAN LANGKAH PERBAIKAN

Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaporan kinerja Disnaker Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang sesuai hasil reuiu didapatkan rekomendasi tahun 2025 sebagai berikut :

NO	ASPEK REVIU	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Format	1. Menyajikan upaya perbaikan dengan cara bagaimana? (bab IV penutup)	1. Menambahkan langkah-langkah perbaikan
2	Mekanisme penyusunan	1. Melengkapi SOP Penyusunan LKJ/ Pengumpulan data; 2. Memastikan setiap data matrik/tabel/ grafik sudah dilengkapi informasi sumber data; 3. Menambahkan matrik monev capaian PK/IKI Minimal s.d Es.IV. untuk melihat kontribusi tiap jenjang pada capaian kinerja PK Kepala PD	1. Menambahkan SOP Penyusunan LKJ/ Pengumpulan data; 2. Memastikan dan menambahkan keterangan sumber data; 3. Menambahkan matrik monev Capaian PK/IKI Minimal s.d Es.IV
3	Substansi	1. Menambahkan data realisasi anggaran dengan LRA Pada Bab III	1. Menambahkan data LRA bab III

Aspek rekomendasi lainnya adalah perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung lemah, kurang responsif, dan keberadaan data kurang dipandang penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kinerja pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pada beberapa elemen data terjadi inkonsistensi sehingga apabila diperlukan *data series* untuk dilakukan analisis kesinambungan capaian kinerja pada suatu indikator kinerja, nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten. Langkah-langkah penanganan dan perbaikan tersebut antara lain :

1. Diperlukannya pendampingan dari bagian perencanaan secara intens, periodik dan berkelanjutan melalui desk berkala, agar pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang tugas terkait data-data pendukung indikator kinerja bidang yang bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang harus dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai *data effort* yang bersifat prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang bersangkutan dengan atasan langsungnya;
2. Pencapaian kinerja yang telah diperoleh, terutama pada indikator kinerja yang berada pada kategori 'kurang' atau belum mencapai target, perlu mendapatkan perhatian lebih dan ditingkatkan pencapaiannya melalui evaluasi berkala kinerja

yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap unit teknis pelaksana dalam rapat staf setiap bulan, triwulan maupun semester. Hal ini wajib dilakukan sebagai upaya langkah perbaikan di berbagai tugas, pokok dan fungsinya, untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, baik melalui komitmen perencanaan yang spesifik, detail dan terpetakan dengan seksama, pelaksanaan secara matang melalui rapat dan koordinasi internal yang berkesinambungan serta monev yang reliable dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian hasil dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dan proses pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang telah memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, Februari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770221 199511 1 001

LAMPIRAN

LAMPIRAN



IPAPED

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN S,STP., MM
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S,STP., MM
Pembina Tk. I
NIP 197702211995111001

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	1.1	Persentase peserta pelatihan yang berkualitas dan kompeten	87%
		1.2	Persentase penyerapan tenaga kerja	86%
2	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan	2.1	Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan	3,5%
		2.2	Persentase perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial	86%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,5 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	86 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rp. 5.259.052.600	P APBD 2024
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp. 740.160.240	P APBD 2024
3	Program penempatan tenaga kerja	Rp. 340.000.000	APBD 2024
4	Program hubungan industrial	Rp. 4.200.749.900	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S,STP., MM
Pembina Tk. I
NIP 197702211995111001



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

== PERUBAHAN == RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan nantinya akan dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dimana terdapat 4 (empat) program yang terdiri dari 3 (Tiga) Program Prioritas dan 1 (satu) program pendukung.

Harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu perubahan indikatif Tahun 2024.

Mojokerto, Agustus 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,

MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770221 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TW. II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 22	
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD.....	23
2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	37
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB IV PENUTUP	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu “*Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah*”, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan perubahan renja OPD ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyesuaian program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Perubahan Renja OPD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian P- RKPD tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto membuat Perubahan Renja yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu

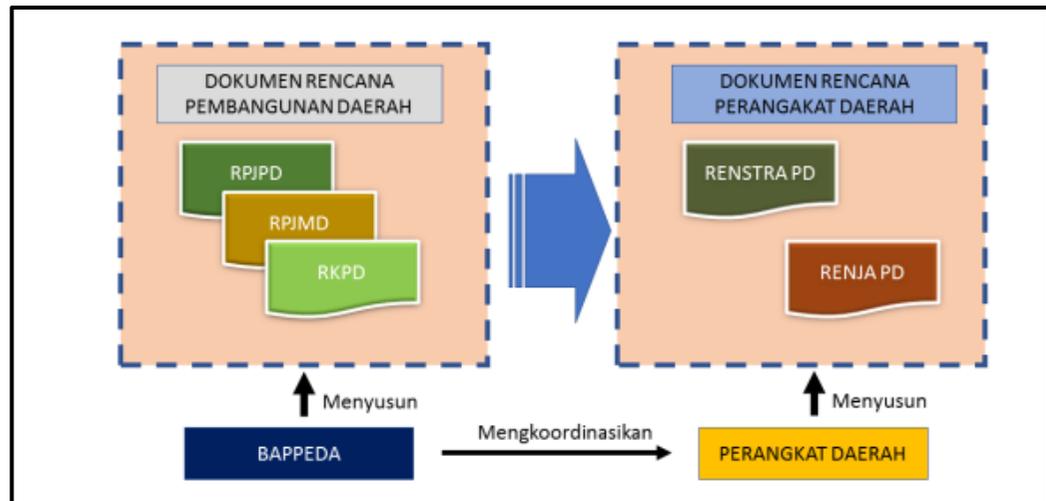
Perubahan Renja ini menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

Bahwa dalam merumuskan tujuan yang jelas, faktual dan realistis perlu diketahui dan diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kebijakan ketenagakerjaan di Provinsi. Kebijakan- kebijakan tersebut meliputi antara lain :

NO	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		PEMERINTAH DAERAH PROV. JAWA TIMUR		PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO	
	VISI	SASARAN STRATEGIS	VISI	SASARAN STRATEGIS OPD	VISI	SASARAN STRATEGIS OPD
	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024; 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan 	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor Ketenagakerjaan; 2. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam rangka hubungan industrial yang kondusif dan perlindungan tenaga kerja; 3. Meningkatnya taraf ekonomi transmigran. 	Terwujudnya masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja; 2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan

Perumusan kebijakan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, dengan mengacu pada P - RKPD tersebut maka diharapkan dokumen Rencana Kerja OPD yang tersusun terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dapat berhasil dan tepat sasaran melalui konsistensi pemahaman antar dokumen baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota..

Diagram 1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
 28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

29. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto:

a. Maksud :

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan,
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan
3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya perubahan Rencana kerja adalah sebagai perwujudan dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L dan RENJA PROVINSI, Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan I pada Tahun N berjalan.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TW. II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra OPD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 pada umumnya dapat tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dan disajikan pada tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 TRIWULAN II

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PD TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (JAN - MAR)		II (APR - JUNI)		III (JUL - SEPT)		IV (OKT - DES)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Urusan Wajib																										
		Bidang Urusan Ketenagakerjaan																										
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %	38.196.110.687	100 %	14.824.049.774	84,4	5.405.019.600	0,0 0	759.126.7 75	0,00	1.482.189. 872	0,00	-	0,00	-	0,00	2.241.316.647	0,00	41,5	100	17.065.366. 421	100,00	44,6 8			
			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	6 Inovasi		2		2		0,0 0		0,00		0,00		2,00		2,00		1,00		4		66,67				
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM DINAS TENAGA KERJA YANG TERCAPAI SESUAI TARGET	100%	678.827.59 6	19	128.547.20 0	100	17.500.000	33, 3	-	33,3	8.585.000	0	-	0	-	66,6	8.585.000	66,60	49,1	86	137.132.200	8560,0 0	20,2 0			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	96.261.085	11	24.473.800	2	7.500.000	0	-	1	3.999.000	0	-	0	-	1	3.999.000	50,00	53,3	12	28.472.800	120	29,5 8			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	582.566.51 1	8	104.073.40 0	4	10.000.000	1	-	1	4.586.000	0	-	0	-	2	4.586.000	50,00	46	10	108.659.400	42	18,6 5			
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	90%	34.262.021. 881	26	13.161.034. 052	90	4.843.359.600	25	759.126.7 75	25	1.305.257. 938	25	-	25,0 0	-	100, 0	2.064.384.713	111,11	42,6	126	15.225.418. 765	14000, 00	44,4 4			
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Org/ bln	34.194.514. 491	108	13.151.034. 052	36	4.843.359.600	36	759.126.7 75	36	1.305.257. 938	0	-	0	-	72	2.064.384.713	200,00	42,6	180	15.215.418. 765	500	44,5 0			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	50 dokumen	67.507.390	12	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	12	10.000.000	24	14,8 1			
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	INDEKS PROFESIONALITAS ASN DINAS TENAGA KERJA	75%	86.261.085	75	37.045.000	75	-	10	-	15	-	25	-	25	-	75,0	-	100,00	-	150	37.045.000	20000	42,9 5			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5 paket	86.261.085	1	37.045.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	1	37.045.000	20	42,9 5			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PD TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (JAN - MAR)		II (APR - JUNI)		III (JUL - SEPT)		IV (OKT - DES)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17											
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SESUAI KEBUTUHAN	100 %	990.210.850	388	412.248.300	100	128.160.000	0	-	40,6	39.951.150	0	-	0	-	41	39.951.150	40,60	31,2	429	452.199.450	428,60	45,67		
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	265.029.560	24	118.653.000	7	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	24	118.653.000	80	44,77		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 paket	66.107.390	22	37.574.000	7	8.600.000	0	-	2	3.675.000	0	-	0	-	2	3.675.000	28,57	42,7	24	41.249.000	96	62,40		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	65 paket	202.522.170	39	79.739.800	13	20.000.000	0	-	6	8.729.750	0	-	0	-	6	8.729.750	46,15	43,6	45	88.469.550	69	43,68		
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	5 paket	199.522.170	3	85.316.500	1	16.960.000	0	-	1	13.146.400	0	-	0	-	1	13.146.400	100,00	77,5	4	98.462.900	80	49,35		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 laporan	257.029.560	300	90.965.000	100	32.600.000	0	-	43	14.400.000	0	-	0	-	43	14.400.000	43,00	44,2	343	105.365.000	69	40,99		
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI KEBUTUHAN	100 %	1.171.178.424	72	520.598.530	100	196.000.000	25	-	25	96.961.984	25	-	25	-	100	96.961.984	100,00	49,5	172	617.560.514	172,00	52,73		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	472.551.731	36	217.451.650	12	70.000.000	0	-	6	33.961.984	0	-	0	-	6	33.961.984	50,00	48,5	42	251.413.634	70	53,20		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 laporan	698.626.693	36	303.146.880	12	126.000.000	0	-	6	63.000.000	0	-	0	-	6	63.000.000	50,00	50,0	42	366.146.880	70	52,41		
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH DALAM KEADAAN BAIK	100 %	1.007.610.851	83	564.576.692	100	220.000.000	0,00	-	36,0	31.433.800	0,00	-	0,00	-	36	31.433.800	36,00	14,3	119	596.010.492	119,00	59,15		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	233.275.865	18	135.202.392	6	55.000.000	0	-	3	23.405.000	0	-	0	-	3	23.405.000	50,00	42,6	21	158.607.392	350	67,99		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/KEGIATAN (output)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PD TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (JAN - MAR)		II (APR - JUNI)		III (JUL - SEPT)		IV (OKT - DES)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp														
1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	675.073.901	5	387.217.350	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	5	387.217.350	500	57,36																				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 unit	99.261.085	60	42.156.950	18	15.000.000	0	-	6	8.028.800	0	-	0	-	6	8.028.800	33,33	53,5	66	50.185.750	220	50,56																				
64																																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				46,7	36,3	55,4	1.137.691.094,7	154,0	44,9																				
Predikat kinerja																																													
2.		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGACU PERENCANAAN TENAGA KERJA	100%	325.000.000	70%	72.497.300	25	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	1	72.497.300	70,00	22,31																				
		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	JUMLAH DOKUMEN RENCANA TENAGA KERJA YANG TERSUSUN	4 dokumen	325.000.000	1	72.497.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	72.497.300	25	22,31																				
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	4 dokumen	325.000.000	1	72.497.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	72.497.300	25	22,31																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				#DIV/0!	#DIV/0!	1,0	72.497.300,0	25,0	22,3																				
Predikat kinerja																																													
3.		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	35%	4.976.793.173	70%	2.661.267.750	25	947.700.000	0	-	0	227.717.400	0	-	28,83	-	29	227.717.400	115	24,0	30	2.888.985.150	8437,14	58,05																				
		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	JUMLAH ORANG YANG DILATIH BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	656 Org	3.914.182.321	388	2.303.661.850	128	907.700.000	32	-	32	217.721.400	0	-	0	-	64	217.721.400	50,00	24,0	452	2.521.383.250	69	64,42																				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/KEGIATAN (output)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PD TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (JAN - MAR)		II (APR - JUNI)		III (JUL - SEPT)		IV (OKT - DES)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/KEGIATAN (output)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PD TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET																	
										I (JAN - MAR)		II (APR - JUNI)		III (JUL - SEPT)		IV (OKT - DES)																												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17																	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	71,8	237.516.719,2	52,7	19,7																	
																				Predikat kinerja		SEDANG																						
6,		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN	82 %	1.462.522.500	82%	3.036.749.700	80	3.296.192.000	0	-	0	1.069.008.300	0	-	80,95	-	80,95	1.069.008.300	101,19	32,4	82	4.105.758.000	99,72	280,73																			
			PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERDAFTAR JAMINAN SOSIAL	58 %		75%		56		0		0		0	56,91		56,91		101,63	32,4	58		99,41	280,73																				
		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG TERCAPAI SESUAI TARGET	24 Org	1.462.522.500	210	3.036.749.700	100	3.296.192.000	0	-	99,22	1.069.008.300	0,00	-	0	-	99,22	1.069.008.300	99,22	32,4	309	4.105.758.000	1.288	280,73																			
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	24 perkara	2.356.007.914	404	693.889.600	4	180.000.000	0	-	2	88.280.200	0	-	0	-	2	88.280.200	50,00	49,0	406	782.169.800	1.692	33,20																			
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	50 perkara	405.044.341	41	109.760.400	10	25.000.000	0	-	0	3.392.000	0	-	0	-	0	3.392.000	0,00	13,6	41	113.152.400	82	27,94																			
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	405.044.341	7	129.069.600	1	45.000.000	0	-	0	218.000	0	-	0	-	0	218.000	0,00	0,5	7	129.287.600	700	31,92																			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PD TAHUN LALU (2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (JAN - MAR)		II (APR - JUNI)		III (JUL - SEPT)		IV (OKT - DES)		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
		Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																												
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	1200 Org	2.781.304.4 72	2818 5	2.104.030.1 00	27945	3.046.192.000	0	-	2774 0	977.118.10 0	0	-	0	-	2774 0	977.118.100	99,27	32,1	55925	3.081.148.2 00	4.660	110, 78					
										0		2774 2		0		0														
										Rata-rata capaian kinerja (%)								37,3	23,8	14.094 ,8	1.026.439.5 00,0	1.783, 5	51,0							
										Predikat kinerja										-										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																														
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)										-	-									
TOTAL ANGGARAN										9.988.911.600								3.696.401.597												

Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB									
	KETENAGAKERJAAN									
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	72,11 (A)	84,40 (A)	83,01	98,35	84,90 (A)	240,02	2,83
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	2 inovasi	2	100	1 inovasi	4	4,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	3	3,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6	3,00
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2 dokumen	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	10	2,50
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	90%	100%	100,00	90%	2,8	3,11
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembiayaan Gaji dan TunjJumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln	14 bulan	36 orang/bln	36 orang/bln	100	36 orang/bln	86	2,39
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	75%	75%	75%	100	75%	2,25	3,00
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N- 3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N- 2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	7 kegiatan	6 paket	6 paket	100	7 paket	20	2,86
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	12 kegiatan	5 paket	5 paket	100	7 paket	24	3,43
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	13 kegiatan	13 paket	13 paket	100	13 paket	39	3,00
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	1 kegiatan	1 paket	1 paket	100	1 paket	3	3,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	100 kegiatan	100 laporan	100 laporan	100	100 laporan	300	3,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36	3,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36	3,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6 kendaraan	6 unit	6 unit	100	6 unit	18	3,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	3 kegiatan	1 unit	1 unit	100	1 unit	5	5,00
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 unit	18 unit	15 unit	15 unit	100	18 unit	51	2,83
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	1	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	1	0,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N- 3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N- 2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	41,67%	25%	28,83	115,32	30%	29,55	98,49
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	128 orang	192 orang	144 orang	117 orang	100	128 orang	437	3,41
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	176 orang	128 orang	117 orang	91,41	128 orang	421	3,29
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 lembaga	16 orang	16 lembaga	16 lembaga	100,00	0 lembaga	32	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	100	30 lembaga	90	3,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	100,00	30 lembaga	90	3,00
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	100	0 perusahaan	8	0,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	100,00	0 perusahaan	8	0,00
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	71,74%	72%	72,41	103,44	72%	73,8	102,57
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 orang	3 kk	3 orang	1 orang	33,33	1 orang	5	5,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	30 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100,00	30 orang	50	1,67
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 orang	40 orang	45 orang	45 orang	100,00	50 orang	135	2,70

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N- 3/2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2023)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N- 2/2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	60	3,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100,00	20 orang	60	3,00
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	0 orang	60	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100,00	0 orang	60	0,00
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	100%	80%	80,95	101,2	80%	82,75	103,44
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%	55,02%	56%	56,91	103,5	56%	58,02	103,61
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100	100,00%	3	3,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 perkara	190 orang	4 perkara	4 perkara	100,00	4 perkara	198	49,50
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	10 penanganan	10 perkara	10 perkara	100,00	10 perkara	30	3,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	2 kegiatan	1 lembaga	1 lembaga	100,00	1 lembaga	4	4,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27945 orang	85 perusahaan	27900 orang	27900 orang	100,00	27945 orang	55930	2,00
	JUMLAH						102,93			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dirumuskan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, antara lain:

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten;
3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
4. Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja dalam Jaminan Sosial.

Target dan realisasi pencapaian dari 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA			84%	84%	84,83			84%	
2	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG BERKUALITAS DAN KOMPETEN			85%	87%	85,21			87%	
3	PERSENTASE TINGKAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN			5%	5%	2,25			5%	
4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM JAMINAN SOSIAL			51%	52%	85,84			52%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bahwa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di bawah target yang dicanangkan yaitu 3,45%, sementara pencapaian angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,68%. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal/ daerah dan luar Daerah serta kekurangsiapan menghadapi era industri 4.0	Bahwa perlunya Pelatihan yang berbasis ketrampilan dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha terhadap pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja/ tenaga kerja tersebut mampu bersaing di level lokal/ daerah dan luar daerah khususnya kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan penyuluhan bursa kerja serta informasi kerja ke dalam bentuk bursa kerja serta mengadakan pembinaan serta perluasan kesempatan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal
2	Kurangnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja K3 yang belum merata di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto; Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikut sertakan ke dalam Program Jaminan Sosial (Cth. BPJS) Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; 	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi penerapan norma kerja, sosialisasi penerapan sarana dan prasarana keselamatan kerja (K3) di perusahaan dalam bentuk monitoring secara langsung dan berkala sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mojokerto; Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto mengikutsertakan seluruh pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya;
3	tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto	Tingginya angka Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja;	Bahwa dengan banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
			contoh isu yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum Kerja, sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka pemutusan hubungan kerja massal atau penutupan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya tidak dapat terhindarkan lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam hal ini akan mengupayakan secara maksimal pendekatan secara sosialisasi maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasikal atau ke perusahaan agar setiap perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan di tingkat perusahaan secara bipartit
4	Kurangnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlunya pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitasi tCalon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pemulangan)
5	Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Fasilitasi Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masih belum dijadikan solusi peningkatan kesejahteraan bagi masy. Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbatasnya kuota calon transmigran; 2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitasi transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Review Rancangan RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan riil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada tabel TC-31.

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	KETENAGAKERJAAN					KETENAGAKERJAAN					
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	KAB. MOJOKERTO	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	5.405.019.600	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	KAB. MOJOKERTO	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	5.259.052.600	
		KAB. MOJOKERTO	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi			KAB. MOJOKERTO	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	17.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	17.500.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	3.750.000	
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	3.750.000	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal			4 dokumen	3.380.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal			4 dokumen	3.380.000	
	Penyusunan Dokumen LKjIP			dokumen	3.350.000	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	3.350.000	
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	3.270.000	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	3.270.000	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			1 kegiatan	-	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			0 kegiatan	-	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.843.359.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.847.392.600	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	4.843.359.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	4.847.392.600	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.464.350.000	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.201.283.000	
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	1.932.120.000	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	2.195.620.000	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	88.740.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	92.340.000	
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-- dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-- dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-- dokumen	-	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-- dokumen	-	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	-	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	128.160.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	128.160.000	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7 paket	50.000.000	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7 paket	50.000.000	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	8.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	8.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	20.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 paket	20.000.000	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 paket	20.000.000	
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	16.960.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	16.960.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	32.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	32.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	32.600.000	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	32.600.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	196.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	196.000.000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	
	Pembiayaan Jasa Air				-	Pembiayaan Jasa Air				-	
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	126.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	126.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 laporan	126.000.000	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 laporan	126.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	220.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	70.000.000	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	55.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	48.347.700	
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	6.652.300	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	-	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 Unit	150.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			0 Unit	-	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	-	Program Perencanaan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	-	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	897.700.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	760.284.340	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	128 Orang	857.700.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	112 Orang	740.160.240	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	857.700.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	112 orang	740.160.240	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer (K)			16 Orang	117.700.000	1 Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	117.700.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	135.000.000	2 Pelatihan dan Sertifikasi Las (K)			16 Orang	135.000.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Las (K)			16 Orang	65.000.000	3 Pelatihan dan sertifikasi cleaning service (K)			16 Orang	65.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi Menjahit (K)			16 Orang	120.000.000	4 Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat			16 Orang	120.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi teknisi AC (K)			16 Orang	120.000.000	5 Pelatihan dan sertifikasi teknisi AC (K)			-	2.460.240	
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)					Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)					
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	Pelatihan dan Sertifikasi Receptionist (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Sepeda Motor (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Pemandu wisata (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi Pemijatan Refleksi (Reflexology) (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Pemijatan Refleksi (Reflexology) (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Lembaga	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Lembaga	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			0 Lembaga	-	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			0 Lembaga	-	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 lembaga	40.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	15 lembaga	20.124.100	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 lembaga	40.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	15 lembaga	20.124.100	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	20.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				124.100	
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	20.000.000	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	20.000.000	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 perusahaan	-	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 perusahaan	-	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 perusahaan	-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0 perusahaan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 perusahaan	-	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			0 perusahaan	-	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	340.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	340.000.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	115.000.000	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	115.000.000	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	90.000.000	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	90.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitas Transmigrasi			1 Orang	90.000.000	Fasilitas Transmigrasi			1 Orang	90.000.000	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	60 Orang	25.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	30 orang	25.000.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			60 Orang	25.000.000	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			30 orang	25.000.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	175.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	175.000.000	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 Orang	175.000.000	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 Orang	175.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Job Fair			40 stand	175.000.000	Job Fair			40 stand	175.000.000	
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja				-	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja				-	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang	50.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang	50.000.000	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	50.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	50.000.000	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	50.000.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0	-	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0	-	
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0	-	
	RINCIAN :			0	-	RINCIAN :			0	-	
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			0	-	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			0	-	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	KAB. MOJOKERTO	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	3.296.192.000	Program Hubungan Industrial	KAB. MOJOKERTO	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	4.200.749.900	
		KAB. MOJOKERTO	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%			KAB. MOJOKERTO	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%		

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	3.296.192.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	4.200.749.900	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	180.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	180.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000	
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000	
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			30 Orang	50.000.000	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			30 Orang	50.000.000	
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	45.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	45.000.000	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27970 Orang	3.046.192.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	29024 Orang	3.950.749.900	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			45 Orang	35.000.000	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			45 Orang	35.000.000	
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			80 Orang	60.000.000	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			80 Orang	60.000.000	
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	80.000.000	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	80.000.000	
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan				-	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			0	-	
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	2.871.192.000	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			28919 Orang	3.775.749.900	
	JUMLAH				9.938.911.600	JUMLAH				10.560.086.840	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan rekapitulasi Perubahan Renja tahun 2024 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2024 kemudian disinkronisasikan melalui P.RKPD dengan pagu indikatif sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
MATRIKS PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
	KETENAGAKERJAAN												
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	Kab. Mojokerto	5.259.052.600					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi							
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%		17.500.000					
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		7.500.000					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 dokumen		3.750.000					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 dokumen		3.750.000					
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		10.000.000					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan					4 dokumen		3.380.000					
	Penyusunan Dokumen LKjIP					1 dokumen		3.350.000					
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1 dokumen		3.270.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD					1 kegiatan		-					
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%		4.847.392.600					
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln		4.847.392.600					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					36 Org/bln		2.201.283.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					36 Org/bln		2.195.620.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					36 Org/bln		92.340.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527 Org/bln (12 bln)		358.149.600					
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		-- dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan admonistrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-- dokumen		-					
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%		-					
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 paket		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas					0 paket		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%		128.160.000					
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		7 Paket		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7 paket		50.000.000					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		7 paket		8.600.000					
	RINCIAN :												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					7 paket		8.600.000					
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 paket		20.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan					13 paket		20.000.000					
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 paket		16.960.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan bahan/ material ATK					1 paket		16.960.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 laporan		32.600.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas					100 laporan		32.600.000					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%		196.000.000					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan		70.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Komunikasi					12 bulan		6.218.806					
	Pembiayaan Jasa Air							-					
	Pembiayaan Jasa Listrik					12 bulan		63.781.194					
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan		126.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)					12 laporan		126.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100%		70.000.000					
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit		55.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		48.347.700					
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		6.652.300					
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		0		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor					0		-					
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		18 Unit		15.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor					18 Unit		15.000.000					
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja			Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja		100%	Kab. Mojokerto	-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 dokumen		-					
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		0 dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					0 dokumen		-					
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	Kab. Mojokerto	760.284.340					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		112 Orang		740.160.240					
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		112 orang		740.160.240					
	RINCIAN :												
	1 Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)					16 Orang		117.700.000					
	2 Pelatihan dan Sertifikasi Las (K)					16 Orang		135.000.000					
	3 Pelatihan dan sertifikasi cleaning service (K)					16 Orang		65.000.000					
	4 Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat					16 Orang		120.000.000					
	5 Pelatihan dan sertifikasi teknisi AC (K)					-		2.460.240					
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)						CUKAI (DBHCHT)						

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan Sertifikasi Receptionist (DBHCHT) (K)					16 Orang		100.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Pemandu wisata (DBHCHT) (K)					16 Orang		100.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Pemijatan Refleksi (Reflexology) (DBHCHT) (K)					16 Orang		100.000.000					
	<i>Ket (K) = Kompetensi / (D) = pelatihan skill kemampuan dan keahlian ketrampilan kerja dasar</i>												
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		0 Lembaga		-					
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK					0 Lembaga		-					
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		15 lembaga		20.124.100					
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		15 lembaga		20.124.100					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							124.100					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					15 Perusahaan		20.000.000					
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0 perusahaan		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		0 perusahaan		-					
	RINCIAN :												
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil					0 perusahaan		-					
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja				Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	Kab. Mojokerto	340.000.000					
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100%		115.000.000					
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		1 Orang		90.000.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitas Transmigrasi					1 Orang		90.000.000					
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		30 orang		25.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					30 orang		25.000.000					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%		175.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		50 Orang		175.000.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair					40 stand		175.000.000					
	Penyuluhan informasi bursa kerja							-					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang		50.000.000					
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					20 Orang		50.000.000					
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		0		-					
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		0		-					
	RINCIAN :												
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA					0		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.05	Program Hubungan Industrial				Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%		4.200.749.900					
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%							
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%		4.200.749.900					
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara		180.000.000					
	RINCIAN :												
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					60 Orang		30.000.000					
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					30 Orang		50.000.000					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					30 Orang		50.000.000					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 Kegiatan		50.000.000					
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara		25.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					10 Perkara		25.000.000					
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga		45.000.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					2 Kegiatan		45.000.000					
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	205	29024 Orang		3.950.749.900					
	RINCIAN :												
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					45 Orang		35.000.000					
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					30 Orang		60.000.000					
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					30 Orang		80.000.000					
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan					0		-					
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)					28919 Orang		3.775.749.900					
	JUMLAH							10.560.086.840					

BAB IV PENUTUP

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Bahwa Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta P-RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan Reviu Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 telah disesuaikan dengan kondisi Reviu Renstra 2021-2026 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, Agustus 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770221 199511 1 001